



**LEMBAGA DIKLAT KEUANGAN
DAN
INFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA**
Sekretariat : Jl. Peta Komplek Gg.Buah No.150/95 Bandung
(Po Box 1456 Bandung - Kode Pos 40000)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105.

Nomor : 088/L.Pjk/LDK-DIPI/VII/19.
Lampiran : Jadwal Acara
Perihal : Loka Karya Perpajakan

Bandung, 05 Juli 2019.

KEPADA YTH,
KEPALA UPBJJ-UT BANDUNG
JL.PANYELEUKAN RAYA NO.1-A.
SOEKARNO HATTA
KOTA BANDUNG

Dengan Hormat,

Untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan oleh Wajib Pajak, LDK-DIPI akan melaksanakan Loka Karya Perpajakan Satu Hari untuk membahas Kebijakan Pemerintah di bidang Perpajakan secara komprehensif, salah satu diantaranya adalah Kewajiban Perpajakan Bulanan / Tahunan mengenai PPh Potongan Pungutan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN & PPnBM) termasuk WP-OP dan WP-Badan. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak tahun pajak 2019 sejumlah Rp.1.786,40 triliun pasca tax amnesty, setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh antara lain :

1. Memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk memanfaatkan Tariff PPh yg bersifat Final sebesar 0,5% mulai 1 Juli 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ;
2. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan PPh Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan ;
3. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengisi dengan benar dan lengkap SPT Tahunan PPh ;
4. Secara tertib dan benar Wajib Pajak diminta melakukan Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4(2) ; PPh Pasal 15 ; PPh Pasal 21 ; PPh Pasal 22 ; dan PPh Pasal 23 / 26 dan PPN.
5. Jenis-jenis Pemotongan/Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah sebagai berikut ;
PPh Pasal 21 ; PPh Pasal 22 ; PPh Pasal 23 ; PPh Pasal 4(2)/Final ; PPN ;

Perlu diketahui bahwa, bagian keuangan, accounting maupun bendahara merupakan salah satu ujung tombak dalam menghimpun Penerimaan Keuangan Negara, mulai dari pemotongan / pemungutan, penyeteroran & pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran dimasing-masing unit ataupun satuan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari LDK-DIPI menawarkan Loka Karya Perpajakan satu hari dengan topik bahasan "Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty Dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018 Dalam Rangka Memasuki Era Keterbukaan Informasi Untuk Tujuan Perpajakan Serta Kewajiban Perpajakan Bulanan / Tahunan" :

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019.

Pukul : 07.30 s/d 16.00 WIB

Tempat : Hotel Cemerlang Kota Bandung

Jl.Pasir Kaliki No.45. / Hos Tjokroaminoto (Seberang Stasiun KAI Bandung)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105, 022-6071383.

Mengingat Loka Karya ini berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sangat kami harapkan kehadiran Staff terkait sebagai perwakilan peserta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas perpajakan untuk mengikuti Loka Karya Perpajakan satu hari dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan permohonan hadir sebanyak orang. Untuk pengganti berbagai fasilitas yang diberikan (Coffee Break, Makan Siang, Makalah, Sertifikat, CD yang memuat antara lain : UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah berkaitan dgn Pelaksanaan pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemeriksaan Pajak & beberapa Peraturan Pemerintah lainnya). Untuk setiap 1(satu) orang peserta dimohon kontribusinya sebesar Rp.430.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Sebagai Laporan :

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1.Drs.Basri Musri, S.,Ak.,CA.,MM.

*Anggota Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI

*Staff Khusus Ketua IAI Kompartemen Pajak

*Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak & Pengajar/Dosen Pada :

-PKN STAN; FEB Univ. Indonesia; FEB Univ. Trisakti Jakarta.

-Program Pendidikan Akuntansi Bank Central Asia

-Program Magister Akuntansi & Pendidikan Profesi Akuntansi

2.Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Negeri Pajajaran Bandung (UNPAD)

3.Arsip.

Hormat Kami,
Lembaga Diklat Keuangan dan
Informasi Perpajakan Indonesia





**LEMBAGA DIKLAT KEUANGAN
DAN
INFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA**
Sekretariat : Jl. Peta Komplek Gg. Buah No.150/95 Bandung
(Po Box 1456 Bandung - Kode Pos 40000)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105.

Nomor : 088/L.Pjk/LDK-DIPI/VII/19.
Lampiran : Jadwal Acara
Perihal : Loka Karya Perpajakan

Bandung, 05 Juli 2019.

KEPADA YTH,
KETUA KOPERASI PEGAWAI
UPBJJ-UT BANDUNG
JL.PANYELEUKAN RAYA NO.1-A.
SOEKARNO HATTA
KOTA BANDUNG

Dengan Hormat,

Untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan oleh Wajib Pajak, LDK-DIPI akan melaksanakan Loka Karya Perpajakan Satu Hari untuk membahas Kebijakan Pemerintah di bidang Perpajakan secara komprehensif, salah satu diantaranya adalah Kewajiban Perpajakan Bulanan / Tahunan mengenai PPh Potongan Pungutan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN & PPnBM) termasuk WP-OP dan WP-Badan. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak tahun pajak 2019 sejumlah Rp.1.786,40 triliun pasca tax amnesty, setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh antara lain :

1. Memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk memanfaatkan Tariff PPh yg bersifat Final sebesar 0,5% mulai 1 Juli 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ;
2. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan PPh Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan ;
3. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengisi dengan benar dan lengkap SPT Tahunan PPh ;
4. Secara tertib dan benar Wajib Pajak diminta melakukan Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4(2) ; PPh Pasal 15 ; PPh Pasal 21 ; PPh Pasal 22 ; dan PPh Pasal 23 / 26 dan PPN.
5. Jenis-jenis Pemotongan/Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah sebagai berikut ;
PPh Pasal 21 ; PPh Pasal 22 ; PPh Pasal 23 ; PPh Pasal 4(2)/Final ; PPN ;

Perlu diketahui bahwa, bagian keuangan, accounting maupun bendahara merupakan salah satu ujung tombak dalam menghimpun Penerimaan Keuangan Negara, mulai dari pemotongan / pemungutan, penyetoran & pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran dimasing-masing unit ataupun satuan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari LDK-DIPI menawarkan Loka Karya Perpajakan satu hari dengan topik bahasan "Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty Dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018 Dalam Rangka Memasuki Era Keterbukaan Informasi Untuk Tujuan Perpajakan Serta Kewajiban Perpajakan Bulanan / Tahunan " :

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019.

Pukul : 07.30 s/d 16.00 WIB

Tempat : Hotel Cemerlang Kota Bandung

Jl. Pasir Kaliki No.45. / Hos Tjokroaminoto (Seberang Stasiun KAI Bandung)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105, 022-6071383.

Mengingat Loka Karya ini berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sangat kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu Ketua Koperasi atau Staff terkait sebagai perwakilan peserta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas perpajakan untuk mengikuti Loka Karya Perpajakan satu hari dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan permohonan hadir sebanyak orang. Untuk pengganti berbagai fasilitas yang diberikan (*Coffee Break, Makan Siang, Makalah, Sertifikat, CD yang memuat antara lain : UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah berkaitan dgn Pelaksanaan pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemeriksaan Pajak & beberapa Peraturan Pemerintah lainnya*). Untuk setiap 1(satu) orang peserta dimohon kontribusinya sebesar Rp.430.000.- (*Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Sebagai Laporan :

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1. Drs. Basri Musri, S., Ak., CA., MM.

*Anggota Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI

*Staff Khusus Ketua IAI Kompartemen Pajak

*Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak & Pengajar/Dosen Pada :

- PKN STAN; FEB Univ. Indonesia; FEB Univ. Trisakti Jakarta.

- Program Pendidikan Akuntansi Bank Central Asia

- Program Magister Akuntansi & Pendidikan Profesi Akuntansi

2. Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Negeri Pajajaran Bandung (UNPAD)

3. Arsip.

Hormat Kami,

Lembaga Diklat Keuangan dan
Informasi Perpajakan Indonesia



**LEMBAGA DIKLAT KEUANGAN
DAN
INFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA**

Sekretariat : Jalan Peta Komplek Gg. Buah No.150/95. Bandung
(Po Box 1456 Bandung - Kode Pos 40000)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105.

Loka Karya Perpajakan Satu Hari Tentang

*" Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty Dan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Tahun 2018 Dalam Rangka Memasuki Era Keterbukaan Informasi
Untuk Tujuan Perpajakan Serta Kewajiban Perpajakan Bulanan / Tahunan "*

Kamis, 8 Agustus 2019 di Hotel Cemerlang Kota Bandung

Jl.Pasir Kaliki No.45. / Hos Tjokroaminoto (Seberang Stasiun KAI Bandung)

Telp. 081367089689 (WA), 0818431105, 022-6071383.

Latar Belakang

Beberapa kebijakan umum Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengamankan rencana penerimaan pajak tahun pajak 2019 sejumlah Rp.1.786,40. triliun pasca tax amnesty dan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2018 antara lain adalah ;

1. Memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk memanfaatkan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% mulai 1 Juli 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.23. Tahun 2018 ;
2. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang tidak memanfaatkan UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 2017 tentang Pengenaan PPh Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan ;
3. Secara tertib dan benar Wajib Pajak diminta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016 ;
4. Secara tertib dan benar Wajib Pajak diminta melakukan pemungutan PPh Pasal 22 berpedoman kepada PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016 ;
5. Secara tertib dan benar Wajib Pajak diminta melakukan pemotongan PPh Pasal 23 berpedoman kepada PMK No.141/PMK.03/2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
6. Secara tertib & benar WP diminta melakukan pemungutan PPN berpedoman kepada UU No.42. Thn 2009.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berbeda dan luar biasa agar target penerimaan pajak tahun pajak 2019 dapat tercapai. Antisipasi terjadinya sanksi yang tidak diharapkan akibat dari kebijakan tersebut, kami dari LDK-DIPI mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti lokakarya perpajakan satu hari dengan topik bahasan *"Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty Dalam Rangka Memasuki Era Keterbukaan Informasi Untuk Tujuan Perpajakan dan Menyongsong Tarif PPh Final 0,5% "*.

Adapun materi bahasan/jadual acara Loka Karya Pajak sbb :

07.00-07.30 : Registrasi Peserta

07.30-08.00 : Coffee Break

08.00-12.00 : Sesi Pertama

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Wajib Pajak Yang Dapat dan Tidak Dapat Memanfaatkan Tarif PPh Yang Bersifat Final Sebesar 0,5% ;
2. Penghasilan (Objek) Yang Dapat dan Tidak Dapat Dikenakan PPh Yang Bersifat Final ;
3. Mekanisme Penyeteroran / Pemotongan ;
4. Yang perlu dicermati sehubungan kewajiban bulanan Wajib Pajak berkaitan dengan PPh Pasal 4(2) ; PPh Pasal 15 ; PPh Pasal 21; PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 / 26 ; dan
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi ;
 - a. Penghasilan / Pembayaran yang dipungut / dipotong dan tidak potong / dipungut PPh Pasal 4(2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23/26 dan PPN
 - b. Pihak yang diwajibkan sebagai Pemotong / Pemungut PPh Pasal 4(2); PPh 15; PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23/26 PPN
 - c. Cara hitung PPh Pasal 4(2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23/26 dan PPN

Pembawa Materi : Bapak Drs.Basri Musri. S. Ak.,CA.,MM.

Tax Advisor & Attorney ;

*Anggota Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI ;

*Tim Ahli Bidang Pengembangan Pedoman Akuntansi Perpajakan IAI Kompartemen Pajak ;

*Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak ;

Dosen / Pengajar pada ; *Politeknik Keuangan Negara / PKN-STAN

*Program Pendidikan Akuntansi Bank Central Asia.

*Program Megister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi :

FEB Universitas Indonesia / UI ; FEB Universitas Trisakti Jakarta.

Moderator : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pajajaran Bandung
Tanya Jawab

13.00-16.00 : Seksi Kedua

PEMERIKSAAN PAJAK

1. Landasan hukum dilakukannya pemeriksaan pajak
2. Kriteria Wajib Pajak yang dapat diperiksa
3. Kewajiban dan hak Wajib Pajak apabila diperiksa
4. Wewenang & Kewajiban Aparat Pajak sehubungan dengan pemeriksaan
5. Teknik dan Metode yang digunakan dalam pemeriksaan pajak
6. Transaksi transaksi yang menimbulkan koreksi fiskal
7. Strategi menghadapi pemeriksaan pajak

SIMULASI PENGISIAN SPT TAHUNAN ;

1. PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan
2. PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2018

Pembawa Materi : Bapak Drs.Basri Musri. S. Ak.,CA.,MM.

*Anggota Dewan Penegakan Disiplin Anggota IAI ;

*Tim Ahli Bidang Pengembangan Pedoman Akuntansi Perpajakan IAI Kompartemen Pajak ;

*Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak ;

Dosen / Pengajar pada ; *Politeknik Keuangan Negara / PKN-STAN

*Program Pendidikan Akuntansi Bank Central Asia.

*Program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi :

FEB Universitas Indonesia / UI ; FEB Universitas Trisakti Jakarta.

Moderator : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pajajaran Bandung
Tanya Jawab

16.00 s/d Selesai : *Pembagian Sertifikat & CD yang memuat : UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan beberapa Peraturan Pemerintah Lainnya.*
Kamis, 08-8-2019 di Hotel Cemerlang Kota Bandung
Jl.Pasir Kaliki NO.45. / Hos Tjokroaminoto (Seberang Stasiun KAI Bandung)
Telp. 081367089689 (WA), 0818431105, 022-6071383.

Catatan :

- *Konfirmasi peserta selambat-lambatnya H-3 / H-1 agar dapat kami daftarkan sebagai peserta Lokakarya Perpajakan pada hari Kamis, 08-8-2019 di Hotel Cemerlang Kota Bandung.
- *Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat registrasi kepada petugas kami di lapangan, dimohon agar dapat menghubungi panitia pelaksana terlebih dahulu di nomor Tlp. 081367089689 (WA), 0818431105, atau pembayaran dapat dilakukan pada saat hari pelaksanaan loka karya perpajakan.
- *Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelaksana melalui Contact Person di nomor Telp. 081367089689 (WA), 0818431105.

Hormat Kami,
Lembaga Diklat Keuangan dan
Informasi Perpajakan Indonesia

AGUN NELFA
Panitia Pelaksana